



PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBUN KAKAO RAKYAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Improving The Development Of Smallholder Cocoa Plantations In Padang Pariaman District

Chandra Refolta¹

¹Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman

email koresponden: chanrefolta81@gmail.com

Abstrak

Padang Pariaman merupakan satu dari tiga daerah di Sumatera Barat yang ditetapkan menjadi Kawasan Pengembangan Pertanian Komoditi Kakao, bersama Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat (Kementan RI, 2018). Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, komoditi kakao merupakan salah satu komoditi unggulan di subsektor perkebunan yang menjadi andalan bagi Kabupaten Padang Pariaman sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan luas perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami penurunan (BPS Padang Pariaman, 2024). Penurunan luas dan produksi kakao di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh kurang terkelolanya kebun kakao oleh petani, sehingga terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap tanaman kakao, salah satunya oleh jamur *Phytophthora palmivora* (Nasir, 2016). Rekomendasi kebijakan yang bisa dijalankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya peningkatan pengembangan perkebunan kakao rakyat antara lain; 1). Menetapkan peta arahan peningkatan pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kakao, dan 2). Menetapkan pedoman kebijakan penggunaan bibit unggul bersertifikat untuk rehabilitasi dan peremajaan pekebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman.

Kata kunci: Kakao, kebijakan, pengembangan

Abstract

Padang Pariaman is one of three regions in West Sumatra designated as a Cocoa Commodity Agricultural Development Area, along with Pasaman Regency and West Pasaman Regency (Kementan RI, 2018). As stated in the Strategic Plan of the Padang Pariaman Regency Agriculture and Food Security Service for 2021-2026, cocoa is one of the leading commodities in the plantation subsector which is a mainstay for Padang Pariaman Regency as a driver of the community's economy. Data from the last few years shows that the area of smallholder cocoa plantations in Padang Pariaman Regency continues to decline (BPS Padang Pariaman, 2024). The decline in cocoa area and production in Padang Pariaman Regency was caused by the lack of management of cocoa plantations by farmers, resulting in attacks by Plant Pest Organisms (OPT) on cocoa plants, one of which was the *Phytophthora palmivora* fungus (Nasir, 2016). Policy recommendations that can be implemented by the Department of Agriculture and Food Security of Padang Pariaman Regency in an effort to increase the development of smallholder cocoa plantations include; 1). Determine a direction map for increasing the development of smallholder cocoa plantations in Padang Pariaman Regency based on land suitability classes for cocoa plants, and 2). Establish policy guidelines for the use of certified superior seeds for the rehabilitation and rejuvenation of people's cocoa plantations in Padang Pariaman Regency.

Keywords: Cocoa, policy, development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat dicanangkan menjadi sentra produksi kakao untuk wilayah Indonesia Bagian Barat pada tahun 2006. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholders terkait, menunjuk Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu sentra produksi kakao di Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman diharapkan bisa menjadi pola percontohan dalam pengembangan perkebunan kakao sehingga bisa diikuti daerah potensial kakao lainnya di Provinsi Sumatera Barat (Disbun Sumbar, 2009).

Padang Pariaman merupakan satu dari tiga daerah di Sumatera Barat yang ditetapkan menjadi Kawasan Pengembangan Pertanian Komoditi Kakao, bersama Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat (Kementan RI, 2018). Penetapan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu kawasan pengembangan komoditi kakao dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, yaitu membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat. Maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen melakukan pembangunan disektor pertanian salah satunya pengembangan perkebunan kakao rakyat pada subsektor perkebunan.

Tanaman kakao merupakan salah satu komoditi unggulan di bidang perkebunan yang menjadi andalan bagi Kabupaten Padang Pariaman sebagai penggerak perekonomian masyarakat (DistanKP Padang Padang Pariaman, 2021). Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, disamping komoditi kakao, terdapat komoditi kelapa dan pinang yang menjadi fokus pengembangan disubsektor perkebunan.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor perkebunan mempunyai sumbangan yang cukup signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Nilai PDRB subsektor perkebunan berdasarkan harga konstan pada tahun 2023 sebesar Rp. 476.372,80 juta atau mempunyai kontribusi sebesar 25,09% terhadap PDRB sektor pertanian secara keseluruhan (BPS Padang Pariaman, 2024).

Secara nasional walaupun produksi kakao mengalami penurunan, namun nilai ekspor komoditi kakao Indonesia lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, walaupun kenaikannya tidak begitu tajam. Nilai ekspor komoditi kakao pada tahun 2022 mencapai US\$ 1.259.638.000, dengan rata-rata kenaikan nilai ekspor per tahun sebesar 1,39% (Ditjen Perkebunan Kementan RI, 2023).

Berdasarkan potensi pengembangannya, komoditi kakao memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Komoditi kakao merupakan komoditi strategis yang banyak dibutuhkan untuk bahan baku berbagai industri, baik industri dalam negeri maupun kebutuhan industri luar negeri. Disamping itu, ketersediaan lahan untuk pengembangan kakao di Padang Pariaman masih tersedia. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai perkebunan kelapa yang cukup luas, yakni mencapai 39.514 hektar (BPS Padang Pariaman, 2024) yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman kakao. Menurut Utomo *et al.*, (2015), tumpang sari tanaman kakao dengan kelapa dapat menjadi pilihan untuk mendorong kelestarian lingkungan dalam budidaya kakao.

Sebenarnya menindak lanjuti pencaanangan Sumatera Barat menjadi setra produksi kakao untuk wilayah Indonesia Bagian Barat pada tahun 2006. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui dinas pertanian berupaya mendorong dengan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan pengembangan tanaman kakao. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan sarana produksi dan juga peningkatan sumber daya

menjadi 3.916 ton pada tahun 2023, atau turun sebesar 4.382 ton (52,80%).

Disatu sisi perkembangan harga jual biji kakao dunia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, rata-rata harga kakao tahun 2022 sebesar US\$ 2.368/ton dengan harga tertinggi US\$ 2.664/ton, sedangkan tahun 2023 rata-rata harga kakao US\$ 3.261/ton, dengan harga tertinggi mencapai US\$ 4.312/ton terjadi pada bulan Desember 2023 (ICCO,

Tabel 1. Data Perkembangan Perkebunan Kakao Rakyat Padang Pariaman Tahun 2015-2023.

Tahun	Luas (ha)	Tanaman produktif (Ha)	Tanaman belum produktif (Ha)	Tanaman Tidak produktif (Ha)	Produksi (ton)
2015	17.836	8.550	4.465	4.821	8.298
2016	17.789	7.825	4.408	5.556	7.595
2017	12.772	5.641	-	7.131	5.435
2018	12.618	5.642	215	6.761	5.131
2019	12.406	5.644	462	6.300	5.019
2020	11.690	5.335	458	5.897	4.852
2021	11.374	5.330	460	5.584	4.663
2022	11.158	5.330	462	5.366	4.360
2023	9.584	4.933	462	4.189	3.916

Sumber: BPS Padang Pariaman, 2024 diolah

petani dalam bentuk bimbingan teknis budidaya tanaman kakao. Tercatat pada tahun 2013 luas tanaman kakao di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 17.954 ha (BPS Padang Pariaman, 2014).

Seiring berjalannya waktu, luas perkebunan kakao di Kabupaten Padang Pariaman beberapa tahun terakhir terus menunjukan angka penurunan. Penurunan luas areal ini berdampak langsung terhadap produksi biji kakao kering yang dihasilkan oleh petani (BPS Padang Pariaman, 2024). Berikut data perkembangan perkebunan kakao rakyat di Padang Pariaman tahun 2015-2023.

Berdasarkan tabel 1, perkebunan kakao rakyat di Padang Pariaman pada tahun 2015 seluas 17.836 hektar menjadi 9.584 hektar pada akhir tahun 2023, terjadi pengurangan seluas 8.252 hektar atau setara 46,27% selama sepuluh tahun terakhir. Begitu juga dengan produksi per tahun, dimana tahun 2015 produksi mencapai 8.298 ton turun cukup tajam

2023). Peningkatan harga kakao dunia tentu berdampak terhadap kenaikan harga kakao dalam negeri, karena perkembangan harga kakao domestik mempunyai kecenderungan mengikuti perkembangan harga kakao dunia. Tahun 2022 harga rata-rata biji kakao ditingkat petani berkisar Rp. 30.000/kg, meningkat menjadi Rp. 43.000/kg pada tahun 2023 (Bappebti, 2024).

Peningkatan harga kakao ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat Padang Pariaman. Dimana ditunjukan oleh produksi biji kakao Padang Pariaman terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh banyak tanaman yang terserang penyakit oleh Oragisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Data tahun 2023 menunjukan seluas 4.189 ha (43,71%) atau hampir setengah dari luas perkebunan kakao yang mengalami kerusakan atau tidak produktif (BPS Padang Pariaman, 2024). Nasir (2016), mengungkapkan *Phytophthora*

palmyra merupakan jamur yang paling virulen, persentase sebarannya sangat tinggi pada sentra produksi kakao yang ditetapkan di Sumatera Barat. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pengelolaan kebun kakao oleh petani.

Mewujudkan penerapan teknik budidaya kakao yang baik yang memperhatikan keamanan pangan, lingkungan, kesehatan dan mutu, pada tahun 2014 Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Teknis Budidaya Yang Baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014. Tujuan penyusunan pedoman ini sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan petugas lapangan dalam penyuluhan dan bimbingan kepada para petani dalam melaksanakan teknis budidaya kakao yang baik dan benar, dengan tujuan meningkatkan produksi dan mutu biji kakao.

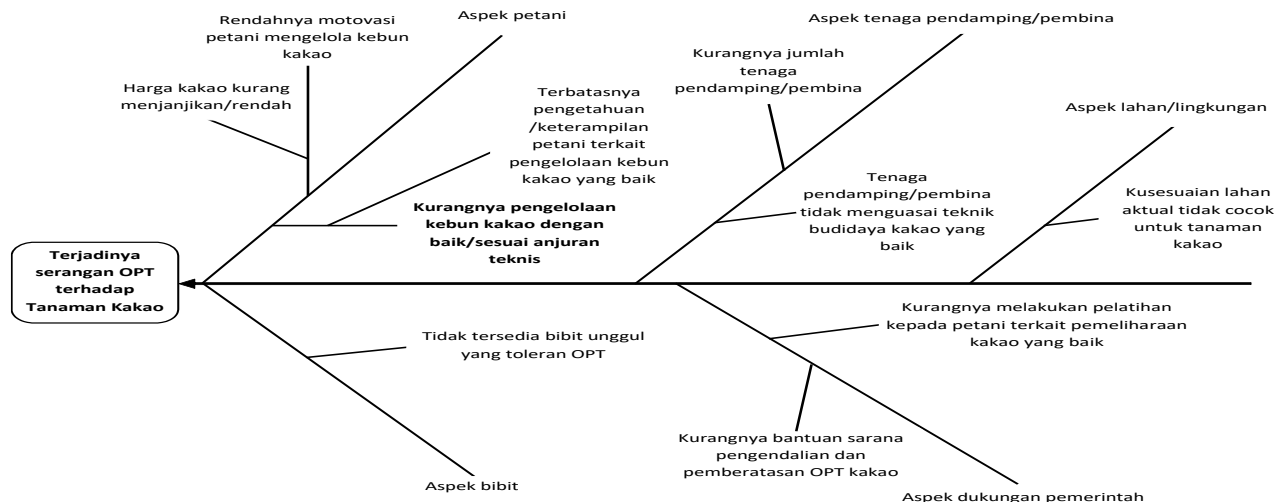
Walaupun sudah ada Peraturan Kementerian Pertanian RI tentang Pedoman Teknis Budidaya

Kakao Yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa*), ternyata pengelolaan kebun kakao yang dilakukan oleh petani belum bisa meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Padang Pariaman. Dari uraian di atas perlu dilakukan identifikasi terkait pengelolaan kebun kakao oleh petani di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini penting untuk diketahui dalam upaya meningkatkan pengembangan kebun kakao rakyat di Padang Pariaman dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat tani kedepannya.

Permasalahan

Perumusan masalah makalah kebijakan ini menggunakan Diagram Fishbone Analysis atau (Ishikawa Diagram). Diagram yang menjadi akar permasalahan terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman kakao disajikan pada gambar berikut.

Dengan demikian, pernyataan masalah policy paper ini adalah terjadinya serangan Organisme Pengganggu



Gambar 1. Diagram akar permasalahan terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman kakao rakyat di Padang Pariaman

Tumbuhan (OPT) terhadap tanaman kakao di sebabkan oleh petani kurang melakukan pengelolaan kebun kakao sesuai teknis budidaya yang baik (Nasir, 2016).

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini antara lain:

1. Mengidentifikasi penyebab kurangnya pengelolaan kebun kakao rakyat yang baik oleh petani di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengembangan kebun kakao di Kabupaten Padang Pariaman

Makalah kebijakan ini sangat berguna bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku instansi utama yang berperan dalam pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pengembangan perkebunan kakao.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode desk study untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan kebun kakao oleh petani di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk menggali informasi juga dilakukan interview kepada stakeholders terkait. Stakeholders yang dilakukan interview adalah Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Koordinator Penyuluh Pertanian di Tingkat Kabupaten, Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dan beberapa orang petani di beberapa sentra kakao di Padang Pariaman. Disamping itu juga dilakukan literature review terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Data dan informasi dilakukan identifikasi dan analisis, sehingga diperoleh rekomendasi yang menjadi fokus acuan dari berbagai alternatif kebijakan terkait peningkatan pengembangan kebun kakao rakyat di Padang Pariaman.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Kakao Kabupaten Padang Pariaman

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023 jumlah petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman berkisar 6.787 jiwa Kepala Keluarga (KK) petani, dengan KK petani paling banyak di Kecamatan Sungai Geringging yaitu mencapai 1.300 jiwa KK petani. Sedangkan KK yang paling sedikit di Kecamatan Ulakan Tapakis dengan 71 KK petani. Perkebunan kakao di Padang Pariaman merupakan perkebunan rakyat, yang diusahakan secara tradisional dalam jumlah yang tidak begitu luas. Rata-rata kepemilikan lahan per KK petani berkisar 1,4 hektar (DistanKP, 2023).

Menurut Zulrasdi *et al.*, (2019) karakteristik umur petani kakao di Kecamatan Sungai Geringging yang merupakan salah satu sentra pengembangan kakao di Padang Pariaman didominasi oleh petani dengan umur berkisar 24-54 tahun (dewasa) yaitu sebesar 67,8%, selanjutnya petani dengan usia 55-64 tahun dan diatas 65 tahun berturut-turut sebesar 25,6 % dan 6,7%. Faktor umur cukup berperan dalam usaha tani kakao. Menurut (Fikrunnisa, 2022) karakteristik petani yang berada pada tingkat umur produktif berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha tani kakao. Pernyataan ini didukung penelitian Effendy *et al.*, (2013) yang menyatakan, faktor umur petani berpengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi teknologi sambung samping pada usaha tani kakao di Kabupaten Sigi Indonesia. Petani muda cenderung lebih mudah menerima inovasi dan hal-hal baru dalam mendukung usahatani, sehingga produksi dan produktivitas bisa meningkat.

Petani Kakao di Kabupaten Padang Pariaman mengusahakan perkebunan kakao dengan sistem sistem *mixed cropping* (kebun campuran) atau bisa juga disebut dengan sistem agroforestri. Tanaman kakao dominan ditanam bersamaan dengan tanaman kelapa, karena Padang Pariaman memiliki kebun kelapa yang cukup luas yaitu sebesar 39.514 hektar (BPS Padang Pariaman, 2024). Penerapan sistem

budidaya kebun campuran mendukung keberlanjutan usaha tani kakao. Hal ini sejalan dengan penelitian Jumiyati *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa, untuk mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan tanaman kakao dilihat dari aspek lingkungan dan ekonomi, petani dapat mengoptimalkan pendapatannya dalam hal keterbatasan sumber daya melalui agroforestri budidaya tanaman kakao.

Untuk memperoleh pandampingan dan pembinaan petani tergabung kedalam kelompok-kelompok tani. Kelompok tani merupakan wadah peningkatan kapasitas dan keterampilan petani dalam perusahaan kebun kakao mereka. Salah satu fungsi kelompok tani adalah wadah belajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri (Kementan RI, 2014). Pengetahuan dan keterampilan petani merupakan salah satu kunci keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan perkebunan kakao.

Mewujudkan penerapan teknik budidaya kakao yang baik yang memperhatikan keamanan pangan, lingkungan, kesehatan dan mutu, pada tahun 2014 Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan pedoman teknik budidaya yang baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014. Tujuan penyusunan pedoman ini sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan petugas dilapangan dalam penyuluhan dan bimbingan kepada para petani dalam melaksanakan teknis budidaya kakao yang baik dan benar, dengan tujuan meningkatkan produksi dan mutu biji kakao. Pengelolaan kebun kakao yang baik dimulai dari pemilihan dan pembukaan lahan, penggunaan bibit dan penanaman, perawatan kebun, pemanenan dan penanganan pasca panen.

Pemilihan Lahan Kakao oleh Petani

Pengusahaan kebun kakao oleh petani di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan secara tradisional dengan sistem tanaman campuran (tumpang sari). Tanaman kakao ditanam sehamparan bersamaan dengan tanaman lain, terutama dengan tanaman kelapa, karena secara teknis pola tanam seperti itu memang bisa dilakukan. Menurut Utomo *et al.*, (2015), tumpang sari tanaman kakao dengan kelapa dapat menjadi pilihan untuk mendorong kelestarian lingkungan dalam budidaya kakao. Utomo *et al.*, (2015) lebih lanjut menjelaskan tanaman campuran antara kelapa dengan kakao memiliki kandungan karbon organik dan bahan organik tanah yang tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat (*Pseudomonas sp.* dan *Trichoderma sp.*).

Pembukaan lahan untuk pertanaman kakao dilakukan secara sederhana dengan menggunakan peralatan seadanya. Lahan dibersihkan dari rerumputan dan perdu, dibuat lubang tanam dan dilakukan penanaman bibit kakao. Biasanya lubang tanam sebelum penanaman dikasih pupuk kandang. Jika lahan membutuhkan pohon pelindung, petani menggunakan jenis pohon pelindung yang sesuai, sampai tanaman kakao tidak membutuhkannya lagi. Apabila kakao ditanam diareal kebun kelapa, petani jarang bahkan tidak memakai pohon pelindung. Begitu juga dengan jarak tanam, petani menyesuaikan dengan kondisi tanaman yang sudah ada sebelumnya dilahan.

Pengusahaan kebun kakao masih bersifat konvensional, jadi para petani tidak mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan untuk tanaman kakao sebelum pembukaan lahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan petani terhadap aspek kesesuaian lahan untuk tanaman kakao. Petani beranggapan, selagi lahan yang mereka

miliki memungkinkan untuk ditanami tanaman kakao, maka mereka akan memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman kakao. Dinas pertanian selaku instansi teknis yang mempunyai andil dalam pengembangan tanaman kakao juga belum menyusun peta arahan atau data spasial kesesuaian lahan kakao di Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum lahan dibuka, harus dilakukan survey untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Lahan yang hanya memenuhi kelas kesesuaian lahan S1, S2 atau S3 yang diusahakan untuk budidaya kakao (Kementan RI, 2014).

Evaluasi kesesuaian lahan sangat penting karena produksi kakao berkorelasi positif dengan karakteristik lahan yang diusahakan. Neswati *et al.*, (2019) melakukan penelitian kesesuaian lahan untuk pengembangan kakao di Sulawesi Selatan menunjukkan, semakin meningkat indeks kesesuaian lahan (LSI) maka semakin meningkat produksi kakao yang dihasilkan.

Menurut ahli, kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu harus menjadi pertimbangan agar memberikan hasil yang menguntungkan. Potensi suatu wilayah untuk pengembangan pertanian pada dasarnya ditentukan oleh kecocokan antara sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim, tanah, terain, dan hidrologi dengan persyaratan penggunaan lahan atau persyaratan tumbuh tanaman. Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayah dengan persyaratan penggunaan untuk komoditi tertentu memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan tersebut potensial untuk dikembangkan komoditi tersebut (Sitorus, 2004).

Curah hujan salah satu faktor pembatas kesesuaian tanaman kakao yang harus menjadi pertimbangan dalam budidaya tanaman kakao. Tingginya curah hujan akan menyebabkan kelembaban yang tinggi. Lahan dengan kelembaban yang tinggi merupakan lingkungan cocok untuk perkembangan patogen seperti jamur dan bakteri penyebab penyakit pada tanaman kakao. Curah hujan yang ideal untuk tanaman kakao berkisar antara 1.100-4.000 mm/tahun (Kementan RI, 2014).

Penggunaan Bibit Tanaman Kakao

Petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kesulitan dalam memperoleh bibit kakao yang unggul atau bersertifikat, karena ketersediaannya sangat terbatas. Tahun 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslikoka) yang berpusat di Kabupaten Jember Jawa Timur, menerapkan penggunaan benih unggul kakao kepada masyarakat di Padang Pariaman. Setelah beberapa tahun berjalan, penggunaan benih ini tidak bisa meningkatkan produksi kakao di Padang Pariaman.

Sebagian besar petani menggunakan bibit kakao asalan yang bersumber dari biji yang secara kualitas masih diperdebatkan. Hal ini dilakukan petani karena ketersediaan bibit yang sudah bersertifikat masih sulit mereka akses. Baik bibit berasal dari sambung pucuk maupun entres sebagai sumber bibit sambung sampling. Sebagaimana yang termuat dalam pedoman teknis budidaya yang baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*), varietas atau klon yang ditanam sebaiknya yang telah direkomendasikan oleh lembaga resmi terkait. Pertimbangan ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang berproduktivitas tinggi serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit (OPT).

Ariningsih *et al.*, (2021) melakukan penelitian tentang “Permasalahan dan Strategi Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Indonesia”, mengungkapkan bahwa Pembangunan kebun induk sumber benih unggul bersertifikat di wilayah-wilayah pengembangan kakao perlu dilakukan untuk memenuhi ketersediaan benih dan bahan tanam kakao unggul di sentra-sentra produksi kakao sehingga akan memudahkan akses petani terhadap benih kakao unggul yang berkualitas dan bersertifikat.

Pembangunan kebun entres sebagai kebun koleksi dan sumber entres berbagai jenis klon unggul sebaiknya dilakukan di setiap daerah pengembangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan entres, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan

mencegah penyebaran hama dan penyakit tanaman dari satu daerah ke daerah yang lain (Limbongan, 2011).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pengembangan kebun induk kakao untuk memenuhi kebutuhan benih unggul kakao di Kabupaten Padang Pariaman. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/KB.020/12/2017 ditetapkan Kebun Sumber Entres Kakao milik Elias, S.Pd di Kecamatan Sungai Geringging seluas 1 hektar. Selanjutnya Dinas Pertanian juga mengembangkan kebun induk kakao di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam seluas 1 hektar pada tahun 2018. Pohon induk yang dikembangkan bernama varietas BL 50 yang merupakan varietas unggul Sumatera Barat. BL 50 merupakan singkatan dari Balubuih Lima Puluh Kota yang menggambarkan asal usul klonnya yakni dari Payakumbuh Sumatera Barat. Varietas ini merupakan Varietas Unggul Baru (VUB) yang dilepas Kementerian Pertanian dengan SK. Nomor: 649/Kpts/KB.010/10/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 (BISIP, 2023).

Deskripsi BL 50 tercermin dalam bentuk buah yang lonjong besar berwarna merah marun dengan tekstur permukaan kulit buah licin mengkilat dan agak beralur. Potensi produksi varietas BL 50 berupa biji kering/pohon berkisar 3,36 kg/tahun atau setara 3,69 ton/ha/tahun dengan populasi 1.100 pohon/ha. Varietas ini mampu tumbuh pada tipe tanah lempung berpasir dengan ketinggian 490 mdpl (BISIP, 2023).

Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Ketahanan Padang Pariaman telah melakukan sekolah lapang (SL) demplot rehabilitasi tanaman kakao dengan melakukan teknologi sambung samping. Pohon kakao yang masih sehat dengan produksi rendah dilakukan teknik sambung samping menggunakan varietas yang unggul sehingga menghasilkan pohon kakao yang memiliki produktivitas tinggi, tahan

terhadap serangan hama dan penyakit. Disamping itu tanaman kakao hasil sambung samping lebih cepat berproduksi. Menurut Suhendi (2008), dengan teknik sambung samping, petani masih dapat memanen buah kakao dari batang bawah selama batang atasnya belum berbuah. Tanaman hasil sambung samping mulai berproduksi pada umur 18 bulan setelah disambung, dan pada umur 3 tahun tanaman kakao mampu menghasilkan 15 sampai 22 buah per pohon.

Menurut Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Kementan (2008), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan rehabilitasi dengan teknologi sambung samping yaitu:

1. Tanaman kakao dewasa yang dilakukan sambung samping merupakan tanaman yang sehat tetapi perlu direhabilitasi dengan berbagai alasan;
2. Teknik sambung samping dilakukan pada awal musim hujan, saat tanaman dalam kondisi tumbuh aktif yang ditandai dengan kulit batang mudah dibuka;
3. Pastikan batang bawah benar-benar masih dalam keadaan sehat;
4. Siapkan calon batang atas (entres) klon-klon unggul anjuran yang jelas identitasnya;
5. Bahan entres berupa cabang plagiotrop berwarna hijau atau hijau kecoklatan yang daunnya telah menua, dengan diameter 0,75-1,50 cm.

Perawatan Tanaman Kakao

Perawatan tanaman sangat menentukan keberhasilan pengusahaan suatu komoditi, termasuk tanaman kakao. Tanaman kakao sangat membutuhkan perawatan mulai dari tahap penanaman, tanaman belum menghasilkan sampai tanaman telah berproduksi masih membutuhkan perawatan yang intensif (Kementan RI, 2014).

Penggunaan pupuk masih terbatas dilakukan oleh petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman. Danil *et al.*, (2014) menyatakan petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemberian pupuk kimia masih berada dibawah dosis yang dianjurkan, hal ini disebabkan oleh petani kekurangan modal untuk membeli pupuk tersebut. Begitu juga dengan pemakaian pupuk organik. Pemupukan dilakukan oleh petani sangat tergantung dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sesuai anjuran teknis budidaya yang baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*), pemupukan dilakukan dua kali setahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan.

Pemangkasan yang baik masih kurang dilakukan oleh petani, walaupun sebagian kecil petani sudah menerapkannya. Untuk pemangkasan yang baik, para petani sangat membutuhkan bimbingan dari petugas lapangan dan bantuan sarana pemangkasan dari instansi terkait, salah satunya dari Dinas Pertanian Padang Pariaman.

Menurut anjuran teknis budidaya yang baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*), pemangkasan kakao bertujuan untuk mempermudah manajemen hama, penyakit, panen buah agar diperoleh produksi yang tinggi. Pangkas bentuk dilakukan pada tanaman belum menghasilkan (TBM), tujuannya untuk membentuk kerangka percabangan yang kuat dan seimbang. Pangkas pemeliharaan dan produksi dilakukan pada tanaman menghasilkan (TM), tujuannya untuk mempertahankan kerangka percabangan yang sudah terbentuk dan untuk mendapatkan produksi yang optimum.

Pemangkasan bisa diandalkan untuk mengendalikan serangan hama penggerek buah kakao (PBK). Pengendalian hama penyakit dengan menggunakan agen hayati (Jamur *B. bassiana* dan semut hitam *D. thoracicus*) dikombinasikan dengan pemangkasan tanaman kakao dapat meningkatkan hasil panen kakao (Anshary A., 2017).

Data Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) tanaman perkebunan tahun 2023 menunjukkan, serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) terhadap tanaman kakao didominasi oleh serangan hama tupai dengan luas serangan mencapai 2.044 ha (33%), kemudian serangan busuk buah yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora palmivora* yaitu seluas 1.554 ha (25%). Selajutnya secara berturut-turut diikuti serangan penggerek buah (PBK) 1.161 ha (19%), *Helopeltis* sp atau pengisap buah 1.022 ha (16%) dan serangan penggerek batang seluas 456 ha (7%). Serangan hama yang paling luas terjadi di Kecamatan Sungai Geringging, yaitu mencapai 500 ha. Sungai Geringging merupakan salah satu sentra perkebunan kakao di Padang Pariaman.

Tingkat serangan hama dan penyakit terhadap tanaman kakao di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam cukup tinggi, yaitu mencapai 55%-65% (Khairul *et al.*, 2018). Khairul *et al.*, (2018) menambahkan, petani kakao belum melakukan budidaya kakao dengan baik, dimana petani belum memahami hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao mereka serta petani tidak memahami metode pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit tersebut.

Serangan OPT ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas kakao, dimana produktivitas kakao di Padang Pariaman rata-rata lima tahun terakhir hanya 857 kg/ha (BPS Padang Pariaman, 2024). Angka ini masih jauh dibawah tingkat produktivitas potensial yang dapat dicapai apabila dilakukan penerapan teknis budidaya yang baik baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*), yaitu bisa mencapai 1,5-2,5 ton/ha (Kementan RI, 2014).

Pengamatan dilapangan menunjukan bahwa ada sebagian petani mengganti tanaman kakao dengan tanaman yang lain, yang menurut mereka lebih menguntungkan dari tanaman kakao. Walaupun belum terdata dengan baik, fenomena ini memang terjadi pada lahan kakao yang tidak produktif atau tanaman kakao yang sudah rusak. Luas lahan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman terjadi penurunan sebesar 8.252 ha sejak tahun 2015, rata-rata 1.032 ha per tahun atau setara 6,98% per tahun (BPS Padang Pariaman, 2024).

Pada tahap pengendalian OPT, petani menemui kesulitan membedakan atau menentukan gejala serangan yang disebabkan oleh jamur atau bakteri, berbeda dengan gejala yang disebabkan oleh hama yang cukup mudah dikenali. Identifikasi gejala serangan ini sangat menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk langkah pengendaliannya. Ada kalanya menentukan serangan yang disebabkan oleh penyakit (jamur dan bakteri) membutuhkan ketelitian dan kecermatan untuk mengetahuinya. Apabila petani bisa mengenali gejala ini, tentu tindakan sedini mungkin akan bisa dilakukan.

Tindakan pengendalian OPT dapat bersifat preventif dan atau korektif. Pengendalian secara preventif dengan melakukan budidaya tanaman sehat yang bertujuan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT. Kondisi tanaman kakao dan lingkungan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan OPT tetapi memberikan daya dukung optimum bagi perkembangan kakao dan musuh alami OPT. Tindakan pengendalian secara korektif dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan OPT. Pengamatan OPT diarahkan untuk mengetahui dengan cepat dan akurat tentang jenis gangguan tanaman. Hasil pengamatan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian OPT dan tindakan lain yang diperlukan (Kementan RI, 2014).

Pemanenan dan Penanganan Pasca Panen

Informasi yang diperoleh dari Penyuluh Petanian Lapangan dan beberapa orang petani di Kecamatan Sungai Geringging, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik dan V Koto Kampung Dalam, bahwa rata-rata petani di Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemanenan buah kakao satu kali seminggu. Waktu pemanenan lebih ditentukan oleh banyaknya buah kakao yang sudah matang di kebun. Proses pemanenan dilakukan secara sederhana

dengan sarana panen seadanya. Buah yang sudah dipanen langsung dibuka dikebun, kemudian biji kakao yang masih basah dibawa pulang untuk dijemur. Kulit buah kakao setelah dikupas biasanya diletakan begitu saja dikebun, jarang petani memanfaatkannya untuk dijadikan pakan ternak atau bahan pembuatan pupuk oragnik/kompos.

Pada saat pemanenan petani tidak melakukan sortasi atau memisahkan antara buah yang baik dengan buah yang busuk atau yang cacat. Sortasi buah dimaksudkan untuk menghindari tercemarnya buah sehat oleh buah yang busuk. Sortasi buah saat panen merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit ke seluruh kebun (Kementan RI, 2014). Buah yang terserang hama penyakit harus segera dikupas, setelah diambil bijinya, kulitnya segera ditimbun kedalam tanah.

Petani kakao di Padang Pariaman tidak melakukan fermentasi biji kakao, karena tidak ada perbedaan harga jual antara biji fermentasi dengan non fermentasi. Menurut anjuran teknis, biji kakao untuk memperoleh mutu biji kakao yang berkualitas baik harus dilakukan fermentasi dulu sebelum dijemur. Disamping itu, petani juga tidak melakukan sortasi biji sebelum disimpan atau dijual. Sortasi bertujuan memisahkan atau memilah biji kakao berdasarkan kualitasnya (gradasi). Petani berdalih karena tidak ada perbedaan harga jual oleh pedagang pengumpul.

Akses Petani Terhadap Pembinaan dan Pelatihan

Petani merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan usaha tani. Sebagai pihak yang secara langsung melakukan budidaya kakao di lapangan selayaknya petani memperoleh perhatian serius dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sehingga petani bisa melakukan penerapan budidaya kakao yang baik (*Good Agriculture Practice/ GAP on Cocoa*). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani ini

dapat dilakukan melalui transfer informasi dan teknologi kepada petani salah satunya melalui penerapan sekolah lapang (SL).

Penerapan budidaya kakao yang baik dan benar oleh petani dapat terlaksana perlu diadakannya sekolah lapang (SL) kepada para petani. Sebagaimana diuraikan diatas, sekolah lapang merupakan salah satu metode yang dipandang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani. Sekolah lapang yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman kepada petani kakao meliputi teknik sambung samping/pucuk, pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama/penyakit, pemanenan dan penanganan pasca panen. Sekolah lapang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Sehingga, usaha tani diharapkan bisa lebih efisiensi, produktivitas tinggi dan berkelanjutan.

Sekolah lapang terkait pengelolaan kebun kakao yang dilaksanakan Dinas Pertanian Padang Pariaman dalam tujuh tahun terakhir hanya dilakukan sebanyak 3 kali kepada beberapa kelompok tani. Tahun 2017 dilakukan sekolah lapang rehabilitasi kakao dengan teknik sambung samping kepada 5 kelompok tani yang tersebar di beberapa kecamatan, dilanjutkan dengan sekolah lapang yang sama kepada 8 kelompok tani pada tahun 2018. Tahun 2023, kerja sama kelompok swadaya masyarakat nagari dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan sekolah lapang teknik sambung samping dan sambung pucuk serta pengendalian penyakit kepada 3 kelompok tani yang ada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (DistanKP, 2023). Mengingat jumlah kelompok tani yang ada di Padang Pariaman, yaitu sebanyak 1.300 kelompok tani, sekolah lapang ini tentunya belum memadai dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kakao.

Sebelumnya pada tahun 2012 petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman melalui beberapa kelompok tani memperoleh pendampingan dan pembinaan dari Swisscontact dalam hal budidaya kakao yang baik. Kehadiran Swisscontact sebagai

mitra petani kakao tentunya disambut baik oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan keberlanjutan usaha tani kakao di Padang Pariaman. Sayangnya keberadaan lembaga ini sejak tahun 2016 sudah berakhir di Padang Pariaman. Karim *et al.*, (2020) mengungkapkan, kehadiran Swisscontact dalam mendukung usaha tani kakao di Sulawesi Barat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan keberlanjutan usaha tani kakao. Dimana persepsi petani kakao di Sulawesi Barat terhadap program kerja Swisscontact sangat memuaskan dilihat dari dimensi ekonomi dan lingkungan.

Minimnya pelaksanaan sekolah lapang dan pendampingan terhadap petani kakao menyebabkan proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi kakao ke petani berjalan lamban, hal ini tentu saja menyebabkan budidaya kakao sesuai GAP on Cacao sulit tercapai. Effendy *et al.*, (2018) mengungkapkan, faktor produksi yang paling mempengaruhi usaha tani kakao di Sulawesi Tengah adalah efisiensi teknis dalam budidaya kakao. Hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendidikan petani dan melakukan penyuluhan. Layanan penyuluhan harus memberikan informasi kepada petani kakao mengenai penggunaan input yang efisien usaha tani kakao. Effendy *et al.*, (2019) menambahkan, perlunya perumusan kebijakan untuk mempertimbangkan peningkatan kemampuan kelompok wanita tani melalui penyuluhan dan pelatihan dalam upaya efisiensi faktor usaha tani kakao, sehingga produktivitas dan produksi kakao dapat ditingkatkan.

Salah satu kendala dalam meningkatkan produksi kakao di Sulawesi Barat adalah pendidikan petani yang buruk, maka diperlukan pemberdayaan kepada masyarakat tani untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi (Arsyad D.S., 2019). Suh N.N., dan Molua, E.L., (2022) menambahkan, rendahnya produksi kakao di Bagian Wilayah Barat Daya Kamerun disebabkan karena rendahnya penerapan pertanian kakao yang baik. Untuk pengelolaan pertanian yang berkelanjutan perlu dilakukan

peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan dilapangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai leading sektor sekaligus perpanjangan tangan pemerintah daerah berkewajiban untuk terus mendorong dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan penyuluh pertanian. Menurut Sapar *et al.*, (2019), faktor individu penyuluh pertanian berupa kompetensi, motivasi dan kemandirian berpengaruh terhadap kinerja penyuluh itu sendiri dalam membina petani kakao. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan kompetensi petani kakao.

Managanta *et al.*, (2019) mengungkapkan, penyuluh bertanggung jawab terhadap peningkatan kompetensi petani dan menyakinkan petani untuk dapat menerapkan teknik pertanian modern. Penyuluh pertanian dapat menjadi sarana yang menghubungkan petani dengan pusat penelitian dan mencari solusi untuk petani kakao. Oleh sebab itu penyuluh pertanian memiliki peran yang efektif dan penting dalam membantu petani menyelesaikan masalah perkebunan kakao.

PILIHAN KEBIJAKAN

Dari analisis dan pembahasan di atas dapat uraikan beberapa pilihan kebijakan terkait peningkatan pengembangan kebun kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Menyusun Arahan Peningkatan Pengembangan Kakao Berdasarkan Peta Kesesuaian Lahan

Menyusun rencana pengembangan dan rehabilitasi perkebunan kakao rakyat berdasarkan aspek kesesuaian lahan tanaman kakao. Lahan yang hanya memenuhi kelas kesesuaian lahan S1, S2 atau S3 yang diusahakan untuk budidaya kakao (Kementan

RI, 2014). Tahap ini diawali oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyusun peta arahan pengembangan kakao menggunakan data spasial dengan skala peta detail (1:25.000) atau semi detail (1:50.000). Prioritas pengembangan dan rehabilitasi diutamakan pada kesesuaian lahan S1, selanjutnya kesesuaian lahan S2, kemudian lahan dengan kesesuaian S3. Lahan yang tidak sesuai (N) tidak direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan dan rehabilitasi.

Penentuan prioritas ini dengan mempertimbangkan faktor pembatas dari sifat lingkungan fisik lahan yang digunakan. Lahan S1 memiliki faktor pembatas lebih kecil dari lahan S2, begitu juga lahan S2 memiliki faktor pembatas lebih kecil dari S3. Hal ini ekuivalen dengan ketahanan tanaman kakao terhadap potensi serangan OPT. Tanaman kakao yang ditanam pada kesesuaian lahan S1 memiliki kecenderungan lebih rendah terhadap potensi serangan OPT dari pada lahan S2 dan S3. Semakin meningkat indeks kesesuaian lahan (LSI) maka semakin meningkat produksi kakao yang dihasilkan (Neswati *et al.*, 2019).

Peningkatan Pengembangan bibit unggul kakao di Padang Pariaman

Meningkatkan pengembangan kebun induk kakao BL 50 yang ada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sebagai sumber entres perbanyak bibit kakao, baik untuk penyediaan bibit sambung pucuk maupun rehabilitasi tanaman yang tidak produktif lagi melalui sambung samping. Varietas BL 50 merupakan varietas unggul lokal yang telah teruji dan disetujui oleh Kementerian Pertanian RI untuk dikembangkan sebagai sumber benih tanaman kakao.

Ketersediaan kebun sumber bibit ini akan memudahkan petani memperoleh bibit unggul dari varietas yang sudah lulus sertifikasi lembaga terkait.

Pembangunan kebun induk sumber benih unggul bersertifikat di wilayah-wilayah pengembangan kakao perlu dilakukan untuk memenuhi ketersediaan benih dan bahan tanam kakao unggul di sentra-sentra produksi kakao sehingga akan memudahkan akses petani terhadap benih kakao unggul yang berkualitas dan bersertifikat (Ariningsih E, 2021). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Limbongan (2011), pembangunan kebun entres sebagai kebun koleksi dan sumber entres berbagai jenis klon unggul sebaiknya dilakukan di setiap daerah pengembangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan entres, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan mencegah penyebaran hama/penyakit tanaman dari satu daerah ke daerah yang lain.

Penerapan Sekolah Lapang (SL) yang berkesinambungan untuk Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petani

Sekolah lapang terkait penerapan teknis budidaya kakao yang baik (Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa) mutlak dilaksanakan kepada petani. Budidaya sesuai GAP sangat mendukung keberlanjutan pengusahaan perkebunan kakao. Sekolah lapang merupakan pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

Sekolah lapang yang dilaksanakan mencakup bagaimana melakukan peremajaan/rehabilitasi tanaman kakao melalui sambung samping atau sambung pucuk dengan baik dan benar. Dimsamping itu petani juga membutuhkan pembinaan terkait pengenalan serangan OPT, diagnosa gejala serangan OPT selanjutnya memutuskan tindakan apa yang mesti dilakukan untuk pengendalian dan pemberantasan serangan OPT tersebut. Pengetahuan petani tentang pengendalian OPT dengan menggunakan agen hayati lokal juga harus menjadi perhatian demi keberlanjutan pengusahaan kakao secara ekologis. Selanjutnya tahap pamanenan buah kakao yang baik dan benar salah satu faktor yang harus menjadi perhatian serius bagi petani untuk menghindari OPT tidak menyebar di perkebunan kakao.

Teknis pemupukan yang sesuai anjuran harus dikuasai oleh petani. Tepat cara, tepat waktu, tepat bentuk (butiran, tepung atau cair), tepat dosis dan tepat jenis pupuk yang digunakan. Pemupukan yang baik menentukan kondisi dan daya tahan tanaman terhadap lingkungan yang ekstrim, stabilitas produksi serta ketahanan terhadap serang OPT. Prinsip yang perlu diperhatikan, petani harus mengutamakan penggunaan teknik alami untuk mempertahankan dan mengoptimalkan kesuburan tanah (Kementan RI, 2014).

Pemangkasan kebun kakao sangat menentukan keberlanjutan pengusahaan tanaman kakao. Pemangkasan kakao bertujuan untuk mempermudah manajemen hama, penyakit dan panen buah. Pemangkasan bisa diandalkan untuk mengendalikan serangan hama penggerek buah kakao (PBK). Pengendalian hama penyakit dengan menggunakan agen hayati (Jamur *B. bassiana* dan semut hitam *D. thoracicus*) dikombinasikan dengan pemangkasan tanaman kakao dapat meningkatkan hasil panen kakao (Anshary A., 2017).

Berdasarkan uraian diatas sekolah lapang merupakan tindakan yang harus dilakukan kepada petani dalam upaya menjaga keberlangsungan pengusahaan kebun kakao rakyat di Padang Pariaman. Petani merupakan aktor utama yang langsung berperan dalam meningkatkan produksi tanaman kakao. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku instansi yang mempunyai andil dalam menyusun kebijakan di sektor pertanian/perkebunan mempunyai dasar yang kuat untuk pelaksanaan sekolah lapang bagi para petani kakao. Adanya dukungan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya bisa dijadikan dasar pelaksanaan sekolah lapang bagi petani. Sesuai rincian kegiatan dan subkegiatan pendukung yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota, dengan

nomenklatur Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Subkegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Dinas Pertanian bisa memanfaatkan sumber pendanaan ini untuk pelaksanaan sekolah lapang peningkatan pengembangan kakao bagi para petani kakao di Padang Pariaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pengelolaan kebun kakao sesuai teknis budidaya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa) di Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya dilakukan oleh petani, hal ini menyebabkan terjadinya serangan hama dan penyakit (OPT) terhadap tanaman kakao. Dimana petani mempunyai pengetahuan yang terbatas terkait pemeliharaan kebun serta manajemen hama dan penyakit pada tanaman kakao. Disamping itu, petani masih menemui kesulitan dalam memperoleh bibit unggul yang bersertifikat untuk rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao. Padang Pariaman salah satu daerah pengembangan kakao di Sumatera Barat belum bisa mengoptimalkan pengembangan kebun kakao rakyat, dimana luas kebun dan produksi kakao terus mengalami penurunan.

Oleh karena itu perlu diambil suatu kebijakan untuk peningkatan pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman kedepannya.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang bisa dijalankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pelaksanaan budidaya kebun kakao yang baik oleh petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman:

1. Penetapan peta arahan peningkatan pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kakao. Pertimbangan penentuan wilayah yang menjadi prioritas pengembangan merupakan lahan dengan kesesuaian S1, S2 dan S3. Peta arahan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyusun pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas terkait kebijakan penggunaan bibit unggul bersertifikat untuk rehabilitasi dan peremajaan pekebunan kakao rakyat di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan kebijakan ini sebagai berikut:
 1. Melakukan identifikasi kebun kakao yang tidak produktif untuk dilakukan rehabilitasi dan peremajaan.
 2. Menyelenggarakan sekolah lapang (SL) pengendalian hama terpadu (PHT) kepada petani secara berkala dengan fokus pada budidaya kakao yang baik yang mencakup pemangkasan, pemanenan, pemupukan, sanitasi, dan pengendalian/pemberantasan OPT.
 3. Melibatkan tenaga ahli terutama ahli agronomi dan penyuluh pertanian lapangan sebagai nara sumber kegiatan sekolah lapangan.
 4. Melakukan pengembangan kebun induk kakao varietas unggul BL 50 di setiap sentra pengembangan kakao. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan entres, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan mencegah penyebaran hama/penyakit tanaman dari satu daerah ke daerah yang lain.
 5. Memberikan pendampingan dan pelatihan praktis kepada petani mengenai teknik sambung samping dan sambung pucuk menggunakan benih unggul, serta

menyediakan bantuan alat dan bahan untuk pelaksanaan sambung samping dan sambung pucuk.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, minimal sekali enam bulan berdasarkan petunjuk teknis budidaya kakao yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Guspika, MBA., Perencana Ahli Utama Kemeterian PPN/Bappenas Republik Indonesia yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan makalah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan penyusunan makalah kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary A., Basir-Cyio M., Hasanah U., Mahfudz., Saleh S., Edy N., Pasaru F. 2017. Applications of Biological Agents and Pruning Effectively Control Cocoa Pod Borer. *Asian J. Crop Sci.*, 9(4): 125-132.
- Ariningsih E, Purba H.J., Sinuraya J.F., Septanti K.S., Suharyono S. 2021. Permasalahan dan Strategi Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Indonesia. *Jurnal; Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 19 No. 1, Juni 2021.
- Arsyad D.S., Nasir S., Arundhana A.I., Phan-Thien K.Y., Toribio J.A., McMahon P., Guest D.I., Walton M., A. 2019. One Health Exploration of The Reasons For Low Cocoa Productivity In West Sulawesi. *One Health* (2018), <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2019.100107>
- Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. *Sistem Informasi Harga Komoditi*. 2024.
- Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan 2008. *Teknologi Budidaya Kakao*. 2008. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung.
- BISIP Kementan 2023. Penerapan GAP dan SNI Kakao Dukung Peningkatan Produksi dan Ekspor Kakao. <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/berita/penerapan-gap-dan-sni-kakao-dukung-peningkatan-produksi-dan-ekspor-kakao>, diakses 18 Mei 2024.
- [BPS Kabupaten Padang Pariaman] Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. 2014. *Padang Pariaman dalam Angka 2014*. Pariaman (ID): Badan Pusat Statistik.
- Danil, Firdaus M., Hartoyo S. 2014. Produksi dan Pemasaran Kakao di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 11 No. 1, Maret 2014: Hal. 41-51.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. 2009. *Rencana Pembangunan Perkebunan Sumatera Barat Tahun 2010*. Padang (ID): Disbun Sumbar.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. 2023. *Statistik Komoditi Perkebunan Tahun 2023*.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Statistik Perkebunan Jilid I 2022-2024*. 2023.
- Effendy, Hanani N., Setiawan B., Muhaimin W. 2013. Effect Characteristics of Farmers on the Level of Technology Adoption Side-Grafting in Cocoa Farming at Sigi Regency-Indonesia. *Journal of Agricultural Scien*; Vol. 5, No. 12; 2013, <http://dx.doi.org/10.5539/jas.v5n12p72>.
- Effendy. 2018. Factors affecting variation of total factor productivity in cocoa farming in the Central Sulawesi, Indonesia. *Australian Journal of Crop Scien*. *AJCS* 12 (04): 655-660 (2018). <https://doi:10.21475/ajcs.18.12.04.pne1025>.
- Effendy, Pratama M.F., Rauf R.A., Antara M, Basir-Cyio M., Mahfudz, Muhandi. 2019. Factors influencing the efficiency of cocoa farms: A study to increase income in rural Indonesia. *PLoS ONE* 14(4): e0214569. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214569>.
- Fikrunnisa N., 2022 [Tesis]. *Keberlanjutan Agribisnis Kakao pada Level Usaha Tani di Indonesia*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor 2022.
- International Cocoa Organization (ICCO). *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, Vol. XLIX, No. 4, Cocoa year 2022/2023. Published: 30-11-2023
- Jumiyati S., Arsyad M., Rajindra, Pulubuhu D.A.T., Hadid A. 2018. Cocoa based agroforestry: An economic perspective in resource scarcity conflict era. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 157 012009.
- Karim I., Fatmawaty D., Anas., Wulandari E. 2020. The perception of local cocoa farmers to the swisscontact program: economics, environment and social dimension. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 486 012002.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 111/Kpts/KB.020/12/2017 tentang Penetapan Kebun Entres Kakao Milik Elias, S.Pd di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barata Sebagai Kebun Sumber Entres Kakao Klon BL 50.

- Khairul U., Trizelia, Reflin, Winarto. 2018. Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kakao di Kanagarian Campago Kabupaten Padang Pariaman. Buletin Ilmiah Nagari Membangun. Vol 1 No. 4 Desember 2018.
- Limbongan J. 2011. Kesiapan Penerapan Teknologi Sambung Samping Untuk Mendukung Program Rehabilitasi Tanaman Kakao. Jurnal Litbang Pertanian, 30(4): 156-163.
- Managanta A.A., Sumardjo, Sadono D., Tjitropranoto P. 2019. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kompetensi Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Penyuluhan, Maret 2019 Vol. 15 No. 1.
- Nasir N. 2016. Black Pod Disease Caused by Phytophthora palmivora In Assigned Cocoa Center Productions in West Sumatra Indonesia. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences; July-August 2016, RJPBCS 7(4), Page 1756-1761.
- Neswati R., Asrul L., Molla A., Widiyani N., Nurqadri S. 2019. Land Suitability for Cocoa Development in South Sulawesi: An Analysis using GIS and Parametric Approach. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 280 012014.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao Yang Baik (Good Agriculture Practice/ GAP on Cacao).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.
- Sapar, Lamane S.A., Haliq A.I.S., Isriami, Sajriawati, Jusni. 2019. Individual factors and performance of agricultural extension officer and impact on competence of cocoa farmers. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.343 012154.
- Sitorus SRP. 2004. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung (ID): Tarsito. 185 Halaman.
- Suh N.N., Molua, E.L. 2022. Cocoa production under climate variability and farm management challenges: Some farmers' perspective. Journal of Agriculture and Food Research. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100282>.
- Suhendi, D. 2008. Rehabilitasi tanaman kakao: Tinjauan potensi, permasalahan, dan rehabilitasi tanaman kakao di desa Prima Tani Tonggolobibi. hlm. 335-346.
- Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Inovasi Lahan Marginal. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Jember.
- Utomo B., Prawoto A.A., Bonnet S., Bangviwat A. 2015. Environmental performance of cocoa production from monoculture and agroforestry systems in Indonesia. Journal of Cleaner Production 2015, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.102>.
- Zulrasdi, Riza E., Rosa E. 2019. Tingkat Adopsi Teknologi Budidaya dan Fermentasi Biji Kakao oleh Petani dan Hubungannya dengan Sifat-sifat Inovasi (Kasus Petani Kakao di Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Pembangunan Nagari. Vol. 4 Edisi Juni 2019: 83-97.